

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pemberian otonomi daerah seluas luasnya berarti pemberian kewenangan dan keleluasaan (diskreksi) kepada daerah untuk mengelola dan memanfaatkan sumberdaya daerah secara optimal. Agar tidak terjadi penyimpangan dan penyelewengan, pemberian wewenang dan keleluasaan yang luas tersebut harus diikuti dengan pengawasan yang kuat. Meskipun titik berat otonomi diletakkan pada tingkat Kabupaten/ Kota, namun secara esensi sebenarnya kemandirian tersebut harus dimulai dari level pemerintahan ditingkat paling bawah, yakni Desa. Selama ini, pembangunan desa masih banyak bergantung dari pendapatan asli desa dan swadaya masyarakat yang jumlah maupun sifatnya tidak dapat diprediksi.

Pembangunan desa merupakan bagian integral dari upaya mencapai kesejahteraan masyarakat yang merata dan adil, sejalan dengan prinsip keadilan sosial yang menjadi landasan filosofis pembangunan nasional. Dari perspektif filosofis, pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) tidak hanya dipandang sebagai mekanisme finansial semata, melainkan juga sebagai sarana pemberdayaan masyarakat agar desa mampu mengelola potensi lokal secara mandiri, partisipatif, dan berkelanjutan. Dengan landasan ini, efektivitas pengelolaan ADD dalam pembangunan fisik harus mempertimbangkan keberlanjutan manfaat, keterlibatan warga, dan pencapaian tujuan sosial-ekonomi desa secara menyeluruh.

Secara lebih spesifik, filosofi pembangunan desa menekankan bahwa setiap kegiatan yang dibiayai melalui ADD harus selaras dengan kebutuhan riil masyarakat serta menumbuhkan kemandirian desa dalam jangka panjang. Penerapan prinsip-prinsip ini menuntut pengelolaan dana yang transparan, akuntabel, dan tepat sasaran agar pembangunan fisik yang dilaksanakan, seperti infrastruktur jalan, fasilitas umum, dan sarana pelayanan publik, dapat memberikan manfaat nyata dan berkesinambungan bagi seluruh warga desa. Dengan demikian, efektivitas pengelolaan ADD dari perspektif filosofis tidak hanya diukur dari realisasi fisik pembangunan, tetapi juga dari sejauh mana nilai-nilai kemandirian, partisipasi, dan keadilan sosial dapat tercapai melalui pengelolaan dana tersebut.

Adanya PP No.72 tahun 2005 dan di revisi UU No.6 tahun 2014 tentang Desa sangat jelas mengatur tentang pemerintahan Desa, yang menyatakan bahwa Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Landasan pemikiran dalam pengaturan mengenai desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. Pemerintahan desa berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014 adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintahan Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pembangunan fisik di desa merupakan salah satu upaya penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta mendukung kelancaran aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat desa. Namun dalam pelaksanaannya, pembangunan fisik di desa belum sepenuhnya berjalan secara optimal. Hal ini terlihat dari masih adanya infrastruktur yang belum memadai baik dari segi jumlah, kualitas, maupun pemanfaatannya oleh masyarakat. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan pembangunan fisik masih menghadapi berbagai kendala, baik dari aspek perencanaan, pengelolaan anggaran, maupun pelaksanaan program pembangunan di tingkat desa.

Kondisi tersebut juga sejalan dengan hasil pra survei yang telah dilakukan oleh penulis terhadap 20 orang responden yang terdiri dari masyarakat desa. Berdasarkan hasil pra survei tersebut diperoleh gambaran bahwa sebagian responden menilai pembangunan fisik yang dilaksanakan di Desa Karyamukti Kecamatan Pataruman Kota Banjar masih belum optimal dan belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan masyarakat. Untuk lebih jelasnya mengenai hasil pra survei tersebut, penulis sajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 1.1
Data Hasil Pra Survey tentang Pembangunan Fisik yang dilaksanakan
di Desa Karyamukti Kecamatan Pataruman Kota Banjar

No	Indikator	Pernyataan	Ya	Tidak	% Ya	% Tidak
1	Kuanitas Pembangunan Fisik	Jumlah infrastruktur fisik yang dibangun sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan	5	15	25	75
2	Kualitas pembangunan fisik	Hasil pembangunan fisik memenuhi standar teknis dan spesifikasi yang telah ditetapkan	6	14	30,00	70,00

3	Fungsional/manfaat pembangunan fisik	Pembangunan fisik memberikan manfaat nyata dalam menunjang kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat.	7	13	35,00	65,00
---	--------------------------------------	--	---	----	-------	-------

Sumber : Hasil Angket pra survey, 2026.

Berdasarkan hasil pra survei yang dilakukan terhadap 20 orang responden mengenai kondisi pembangunan fisik di Desa Karyamukti Kecamatan Pataruman Kota Banjar, diperoleh gambaran bahwa pelaksanaan pembangunan fisik belum sepenuhnya optimal. Pada indikator kuantitas pembangunan fisik, hanya sebanyak 5 responden atau 25% yang menyatakan bahwa jumlah infrastruktur yang dibangun telah sesuai dengan rencana yang ditetapkan, sedangkan 15 responden atau 75% menyatakan belum sesuai. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah pembangunan infrastruktur yang dilaksanakan masih belum memenuhi rencana atau kebutuhan yang diharapkan masyarakat. Selanjutnya pada indikator kualitas pembangunan fisik, terdapat 6 responden atau 30% yang menyatakan bahwa hasil pembangunan fisik telah memenuhi standar teknis dan spesifikasi yang ditetapkan, sementara 14 responden atau 70% menyatakan belum memenuhi standar tersebut. Kondisi ini mengindikasikan bahwa kualitas pembangunan fisik yang dilakukan masih perlu ditingkatkan agar lebih sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Sementara itu, pada indikator fungsional atau manfaat pembangunan fisik, sebanyak 7 responden atau 35% menyatakan bahwa pembangunan fisik telah memberikan manfaat nyata dalam menunjang kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat. Namun demikian, sebagian besar responden yaitu 13 orang atau 65% menyatakan bahwa pembangunan fisik yang ada belum sepenuhnya memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat. Dengan

demikian, hasil pra survei tersebut menunjukkan bahwa pembangunan fisik di desa masih memerlukan perhatian dan perbaikan agar dapat memberikan manfaat yang lebih maksimal bagi masyarakat.

Belum optimalnya pembangunan fisik di desa diduga dipengaruhi oleh belum optimalnya efektivitas pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD). Pengelolaan ADD yang belum berjalan secara efektif dapat berdampak pada kurang maksimalnya pelaksanaan program pembangunan, baik dari segi perencanaan, pelaksanaan, maupun pengawasan. Kondisi tersebut dapat menyebabkan pembangunan infrastruktur yang dilaksanakan belum sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan masyarakat, baik dilihat dari jumlah pembangunan, kualitas hasil pembangunan, maupun manfaat yang dirasakan oleh masyarakat. Oleh karena itu, efektivitas pengelolaan Alokasi Dana Desa menjadi salah satu faktor penting yang diduga mempengaruhi keberhasilan pembangunan fisik di desa.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjadi tonggak sejarah baru dalam tata kelola pemerintahan di Indonesia. Kebijakan ini menempatkan desa bukan lagi sebagai objek pembangunan, melainkan sebagai subjek pembangunan yang memiliki kewenangan penuh dalam mengelola rumah tangganya sendiri melalui prinsip rekognisi dan subsidiaritas. Konsekuensi dari kebijakan ini adalah adanya dukungan finansial yang besar dari pemerintah pusat maupun daerah, salah satunya melalui Alokasi Dana Desa (ADD).

Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) setelah

dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk kemudian dialokasikan kepada desa. Tujuan utama dari ADD adalah menunjang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Dalam konteks pembangunan fisik, ADD diharapkan menjadi stimulus untuk memperbaiki infrastruktur perdesaan yang berdampak langsung pada kesejahteraan ekonomi masyarakat.

Efektivitas pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dapat dilihat dari realisasi kegiatan pembangunan fisik yang benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Berbagai studi menunjukkan bahwa meskipun dana desa telah dicairkan sesuai prosedur, pencapaian pembangunan fisik di tingkat desa sangat dipengaruhi oleh kapasitas aparat desa, keterlibatan masyarakat, dan sistem pengawasan yang diterapkan. Misalnya, penelitian terbaru di beberapa desa Jawa Barat menunjukkan bahwa desa yang menerapkan mekanisme partisipatif dalam perencanaan dan pengawasan ADD berhasil meningkatkan kualitas dan kuantitas pembangunan fisik, sehingga hasil pembangunan lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan lebih berkelanjutan.

Selain itu, peran koordinasi antar lembaga dan transparansi dalam pengelolaan ADD sebagai faktor penting yang memengaruhi efektivitas pembangunan fisik. Data lapangan dari studi di desa-desa pada tahun 2023–2024 menunjukkan bahwa efektivitas pengelolaan ADD lebih tinggi pada desa yang memiliki prosedur pelaporan dan monitoring rutin, serta sistem evaluasi kegiatan yang jelas. (Purnomo dkk., 2023) Hal ini membuktikan bahwa pengelolaan dana desa yang efektif tidak hanya ditentukan oleh besarnya alokasi dana, tetapi juga

oleh implementasi praktik pengelolaan yang baik, partisipatif, dan akuntabel sehingga pembangunan fisik yang dilaksanakan mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Desa Karyamukti, yang terletak di Kecamatan Pataruman, Kota Banjar, merupakan salah satu desa yang menerima ADD setiap tahunnya. Sebagai bagian dari wilayah administratif Kota Banjar yang sedang berkembang, Desa Karyamukti dituntut untuk mampu mengoptimalkan anggaran tersebut guna menjawab tantangan kebutuhan infrastruktur, seperti akses jalan lingkungan, drainase, hingga sarana publik lainnya.

Namun, efektivitas pengelolaan dana ini seringkali menghadapi berbagai tantangan. Efektivitas bukan sekadar tentang penyerapan anggaran yang mencapai 100%, melainkan sejauh mana output pembangunan fisik tersebut memberikan manfaat nyata, tepat sasaran, dan memiliki kualitas yang sesuai dengan standar teknis. Di lapangan, seringkali muncul fenomena di mana pembangunan fisik terkendala oleh beberapa faktor, seperti:

1. Perencanaan yang kurang partisipatif, sehingga pembangunan tidak sesuai dengan skala prioritas masyarakat.
2. Keterbatasan sumber daya manusia di tingkat desa dalam mengelola teknis konstruksi dan administrasi keuangan.
3. Transparansi dan akuntabilitas dalam proses pengerjaan proyek fisik yang sering dipertanyakan.

Begitupula dengan hasil pra survei tersebut diperoleh gambaran bahwa sebagian responden menilai efektivitas pengelolaan dana desa di Desa

Karyamukti Kecamatan Pataruman Kota Banjar belum optimal. Untuk lebih jelasnya mengenai hasil pra survei tersebut, penulis sajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 1.2
Data Hasil Pra Survey tentang Efektivitas Pengelolaan Dana Desa
di Desa Karyamukti Kecamatan Pataruman Kota Banjar

No	Indikator	Pernyataan	Ya	Tidak	% Ya	% Tidak
1	Ketepatan sasaran program	Adanya monitoring dan evaluasi yang dilakukan untuk memastikan Dana Desa tepat sasaran dan tidak menyimpang dari tujuan program	5	15	25,00	75,00
2	Sosialisasi program	Sosialisasi program Dana Desa sudah efektif dalam meningkatkan partisipasi dan pemahaman masyarakat terhadap penggunaan dana desa.	7	13	35,00	65,00
3	Pencapaian tujuan program	Penggunaan Dana Desa telah berhasil dalam mencapai tujuan pembangunan yang telah direncanakan di desa	6	14	30,00	70,00
4	Pemantauan program	Pemerintah desa secara rutin memantau pelaksanaan program yang dibiayai Dana Desa untuk memastikan berjalan sesuai rencana	8	12	40,00	60,00

Sumber : Hasil Angket pra survey, 2026.

Berdasarkan hasil pra survei yang dilakukan terhadap 20 orang responden mengenai efektivitas pengelolaan Dana Desa, diperoleh gambaran bahwa pelaksanaannya masih belum berjalan secara optimal. Pada indikator ketepatan sasaran program, hanya 5 responden atau 25% yang menyatakan bahwa telah

dilakukan monitoring dan evaluasi untuk memastikan Dana Desa tepat sasaran dan tidak menyimpang dari tujuan program, sedangkan 15 responden atau 75% menyatakan hal tersebut belum berjalan dengan baik. Hal ini menunjukkan bahwa proses pengawasan terhadap penggunaan Dana Desa masih perlu ditingkatkan agar program yang dilaksanakan benar-benar tepat sasaran. Pada indikator sosialisasi program, sebanyak 7 responden atau 35% menyatakan bahwa sosialisasi program Dana Desa telah efektif dalam meningkatkan partisipasi dan pemahaman masyarakat terhadap penggunaan dana desa. Namun demikian, sebagian besar responden yaitu 13 orang atau 65% menyatakan bahwa sosialisasi program belum berjalan secara efektif. Kondisi ini menunjukkan bahwa penyampaian informasi terkait program Dana Desa kepada masyarakat masih perlu ditingkatkan agar masyarakat dapat lebih memahami serta berpartisipasi dalam pelaksanaan program pembangunan di desa. Selanjutnya pada indikator pencapaian tujuan program, terdapat 6 responden atau 30% yang menyatakan bahwa penggunaan Dana Desa telah berhasil mencapai tujuan pembangunan yang direncanakan, sedangkan 14 responden atau 70% menyatakan belum tercapai secara optimal. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program yang didanai oleh Dana Desa masih memerlukan peningkatan agar tujuan pembangunan desa dapat tercapai dengan lebih maksimal. Sementara itu, pada indikator pemantauan program, sebanyak 8 responden atau 40% menyatakan bahwa pemerintah desa secara rutin melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan program yang dibiayai Dana Desa, sedangkan 12 responden atau 60% menyatakan bahwa pemantauan tersebut belum dilakukan secara optimal. Hal ini mengindikasikan bahwa kegiatan

pengawasan dan pemantauan program masih perlu diperkuat agar pelaksanaan program dapat berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Berdasarkan hasil pra survei yang dilakukan terhadap 20 orang responden mengenai efektivitas Pengelolaan Dana Desa di Desa Karyamukti Kecamatan Pataruman Kota Banjar, diperoleh gambaran bahwa pengelolaan Dana Desa belum optimal. Hal tersebut terlihat dari masih rendahnya persentase responden yang menyatakan bahwa ketepatan sasaran program, sosialisasi program, pencapaian tujuan program, serta pemantauan program telah berjalan dengan baik. Kondisi ini menunjukkan bahwa efektivitas pengelolaan Dana Desa masih perlu ditingkatkan agar pelaksanaan program pembangunan desa dapat berjalan lebih optimal dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat.

Pentingnya penelitian ini didasarkan pada fakta bahwa keberhasilan pembangunan di Desa Karyamukti akan menjadi barometer bagi efektivitas kebijakan pemerintah Kota Banjar dalam membina desa-desanya. Jika pengelolaan ADD dilakukan secara efektif, maka ketimpangan infrastruktur antarwilayah dapat diminimalisir. Sebaliknya, jika pengelolaan tidak efektif, maka dana yang besar hanya akan menjadi pemborosan anggaran tanpa dampak signifikan bagi kemajuan desa.

Upaya transformasi menuju otonomi desa saat ini tampak seperti ambisi yang dipaksakan dan berisiko tinggi. Dana yang sangat besar ke Desa Karyamukti, Kecamatan Pataruman, Kota Banjar melalui Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun 2025 yang mencapai Rp2,9 Miliar, justru memicu kekhawatiran serius mengenai potensi penyalahgunaan anggaran. Angka fantastis ini tidak

dibarengi dengan jaminan bahwa perangkat desa beserta elemennya memiliki kompetensi yang memadai untuk mengelolanya.

Sangat diragukan apakah mentalitas perangkat desa yang selama ini terbiasa dengan sistem sentralistis dan ketergantungan bantuan keuangan terbatas, mampu berubah seketika menjadi mandiri dan profesional. Keraguan terhadap kapasitas internal desa dalam mengelola dana miliaran rupiah ini bukan tanpa alasan; minimnya pengalaman mengelola anggaran besar secara mandiri berpotensi melahirkan manajemen yang amburadul dan kurang transparan.

Efektivitas dan efisiensi penyaluran dana dari Pemerintah Kota ke Pemerintah Desa kini menjadi titik kritis yang rawan akan kebocoran. Alih-alih menjadi kunci keberhasilan otonomi, dana ini justru bisa menjadi beban yang mengungkap kegagalan desentralisasi akibat buruknya pemanfaatan di tingkat bawah. Dengan segala keterbatasan kronis pada struktur organisasi pemerintahan desa, pengelolaan ADD ini rentan terjebak dalam inefisiensi, salah sasaran, hingga praktik maladministrasi yang hanya akan merugikan masyarakat desa itu sendiri.

Di tengah upaya mendorong kemandirian lokal, Desa Karyamukti, Kecamatan Pataruman, Kota Banjar, kini dihadapkan pada realitas baru berupa kucuran dana yang signifikan. Pada tahun anggaran 2025, desa ini tercatat mengelola Alokasi Dana Desa (ADD) mencapai Rp2,9 Miliar. Namun, di balik angka fantastis tersebut, fakta di lapangan menunjukkan bahwa pemberdayaan masyarakat masih stagnan dan pengembangan aspek sosial budaya hampir tidak

menyentuh akar rumput. Kesenjangan antara besarnya ketersediaan dana dengan rendahnya kualitas hidup masyarakat menjadi anomali yang nyata.

Realitas menunjukkan bahwa selama ini pembangunan desa masih sangat bergantung pada instruksi sentralistis, sementara kapasitas internal organisasi pemerintahan desa dalam mengelola anggaran secara mandiri masih sangat terbatas. Keterbatasan sumber daya manusia dan lemahnya tata kelola organisasi di tingkat desa menimbulkan keraguan: apakah dana miliaran rupiah tersebut akan benar-benar berubah menjadi infrastruktur yang produktif atau justru menguap dalam inefisiensi birokrasi.

Kegagalan dalam mengoptimalkan ADD tidak hanya berarti hilangnya peluang ekonomi, tetapi juga memperlebar disparitas pertumbuhan antarwilayah. Sebaliknya, jika dikelola secara efektif, dana ini seharusnya mampu menjadi mesin penggerak roda ekonomi yang menciptakan lapangan kerja dan pemerataan pendapatan. Berangkat dari fenomena kesenjangan antara besarnya anggaran dengan keterbatasan manajerial di tingkat lokal tersebut, maka penelitian ini bermaksud mengkaji lebih dalam melalui judul : **“Pengaruh Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa terhadap Kualitas Pembangunan Fisik di Desa Karyamukti Kecamatan Pataruman Kota Banjar”**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang penelitian di atas, peneliti mengidentifikasi beberapa permasalahan yang muncul terkait dengan pengaruh efektivitas pengelolaan alokasi dana desa terhadap kualitas pembangunan fisik di Desa Karyamukti Kecamatan Pataruman Kota Banjar, sebagai berikut:

1. Ketidaksesuaian Output Fisik dengan Perencanaan (*Budget-Performance Gap*). Adanya kesenjangan antara volume pembangunan fisik yang direncanakan dalam RKPDes dengan realisasi fisik di lapangan, yang menunjukkan bahwa alokasi dana belum mampu meng-cover seluruh kebutuhan infrastruktur prioritas secara optimal.
2. Rendahnya Kualitas Teknis Pembangunan Infrastruktur. Pembangunan fisik yang dibiayai dari ADD seringkali dianggap hanya mengejar penyelesaian administratif, namun kurang memperhatikan kualitas teknis dan daya tahan bangunan (seperti kualitas pengerasan jalan), sehingga infrastruktur cepat mengalami kerusakan.
3. Optimalisasi Partisipasi Masyarakat dalam Pengawasan Fisik. Belum terciptanya mekanisme kontrol publik yang efektif selama proses pembangunan fisik berlangsung.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang judul di atas, maka permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana efektivitas pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Karyamukti Kecamatan Pataruman Kota Banjar?
2. Bagaimana kualitas pembangunan fisik di Desa Karyamukti Kecamatan Pataruman Kota Banjar?
3. Bagaimana pengaruh efektivitas pengelolaan Alokasi Dana Desa terhadap kualitas pembangunan fisik di Desa Karyamukti Kecamatan Pataruman Kota Banjar?

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui efektivitas pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Karyamukti Kecamatan Pataruman Kota Banjar.
2. Untuk mengetahui kualitas pembangunan fisik di Desa Karyamukti Kecamatan Pataruman Kota Banjar.
3. Untuk mengetahui pengaruh efektivitas pengelolaan Alokasi Dana Desa terhadap kualitas pembangunan fisik di Desa Karyamukti Kecamatan Pataruman Kota Banjar.

1.5 Kegunaan Penelitian

Manfaat dari penelitian yang hendak dicapai dari kegunaan penelitian ini adalah :

1. Secara teoretis

Penelitian ini dapat bermanfaat dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya ilmu manajemen pemerintahan mengenai pengaruh efektivitas pengelolaan alokasi dana desa terhadap kualitas pembangunan fisik.

2. Secara praktis

- a. Hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi positif kepada Desa Karyamukti Kecamatan Pataruman Kota Banjar terkait pengaruh efektivitas pengelolaan alokasi dana desa terhadap kualitas pembangunan fisik.
- b. Hasil penelitian ini juga dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi pihak yang melakukan penelitian selanjutnya karena ternyata masih banyak

variabel yang masih harus diteliti dalam kajian ilmu manajemen pemerintahan sehubungan dengan permasalahan yang penulis teliti.

- c. Hasil penelitian atau kesimpulan-kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini dapat memberikan masukan baru bagi upaya meningkatkan kualitas pembangunan fisik melalui pengelolaan alokasi dana desa (ADD) secara efektif.